

STRATEGIC PAPER

Menjembatani Kesenjangan: Mengoptimalkan Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan dan Inklusi Ekonomi



1 NO
POVERTY



TIM PENYUSUN

Tim Penulis

Putu Geniki Lavinia Natih, PhD
Muhammad Nur Ghiffari, S.E.
Ratu Silfa Addiba Nursahla, S.E.
Arvin Imamsatria Widijanto, S.E.

Tim Pengulas

Rizal Algamar
Gusman Yahya
Tomy Hendrajati
Irvan Nugraha
Dinda Sonaloka Asghar

Ucapan Terima Kasih

Rumah Zakat, Yayasan Kita Bisa

Desain Cover dan Tata Letak

Izzulhaq Mahardika
Stella Angelica

Diterbitkan oleh:

Perhimpunan Filantropi Indonesia
Jakarta, 2025
Jl. Angkasa No. 55, Jakarta Pusat, 10720
E-mail: info@filantropi.or.id
Telp. (021) 6287234

Dilarang menggandakan atau menyebarluaskan sebagian maupun seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, dalam bentuk apa pun, termasuk cetak, digital, maupun media lainnya.

Kata Pengantar

Pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang inklusif merupakan agenda moral sekaligus strategis bagi masa depan Indonesia. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, krisis iklim, dan ketidakpastian global, penguatan kerja sama lintas sektor yang berpihak pada kelompok paling rentan menjadi semakin mendesak. Dalam dinamika tersebut, filantropi hadir bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai katalisator perubahan sosial. Nilai-nilai kedermawanan, solidaritas, dan gotong royong yang menjadi fondasi gerakan filantropi kini semakin relevan untuk menjawab kompleksitas tantangan zaman. Dokumen ini menyoroti urgensi Perlindungan Sosial Adaptif (ASP) sebagai pendekatan strategis dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko sistemik. Peran filantropi menjadi kian signifikan, bukan hanya dalam mobilisasi sumber daya, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat dan mendorong kemandirian melalui inovasi sosial dan upaya menjembatani kesenjangan dalam ekosistem perlindungan sosial nasional.



Franciscus Welirang

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Filantropi Indonesia

Berdasarkan laporan Bappenas 2024, pencapaian SDGs Indonesia menempati peringkat ke-7 secara global dengan capaian 61,4% terhadap target indikator. Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi untuk benar-benar menghapus kemiskinan (*no one left behind*) pada akhir target SDGs tahun 2030. Dinamika ekonomi global turut memengaruhi kondisi kemiskinan di setiap negara. Pencapaian SDGs tidak akan berhasil tanpa kolaborasi berbagai pihak (*pentahelix*). Kerjasama tersebut termasuk harus berjalan berdasarkan prinsip yang sama yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Filantropi, sebagai aktor lintas sektor, memiliki peran strategis dalam percepatan SDGs, khususnya melalui inovasi pendanaan. Oleh karena itu, publikasi ini hadir untuk memetakan peran pelaku filantropi serta mendorong terbentuknya ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini di Indonesia.



Eri Trinurini Adhi

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dalam *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* yang telah kami publikasikan, tercatat bahwa kemiskinan menempati posisi kelima sebagai program prioritas dari berbagai lembaga filantropi yang tersebar di seluruh Indonesia. Temuan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif di kalangan komunitas filantropi bahwa pengentasan kemiskinan adalah fondasi penting bagi terciptanya keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) meyakini bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi lintas sektor, pendekatan berbasis data, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi syarat mutlak bagi terbentuknya ekosistem pengentasan kemiskinan yang tangguh dan inklusif.

Publikasi ini merupakan hasil dari kerja bersama yang mencerminkan semangat gotong royong dan ko-kreasi antar pemangku kepentingan. Di dalamnya terkandung refleksi serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi filantropi dalam memperluas dampak sosial dan menjawab tantangan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih sistemik. Kami berharap publikasi ini tidak hanya menjadi rujukan kebijakan, tetapi juga pemantik lahirnya lebih banyak inisiatif kolaboratif yang berpihak pada kelompok paling rentan dan berkontribusi nyata pada tujuan besar kita yaitu Indonesia yang lebih adil, tangguh, dan sejahtera untuk semua.



Rizal Algamar

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia

Daftar Isi

iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
01	Ringkasan Eksekutif
02	Pendahuluan dan Konteks Permasalahan
04	ASP sebagai Strategi Prioritas untuk Pengentasan Kemiskinan
07	Peran Lembaga Filantropi dalam Mendukung ASP di Indonesia
10	Rekomendasi Kebijakan dan Implikasi
13	Apresiasi & Penghargaan
14	Referensi
15	Lampiran

Ringkasan Eksekutif

Target ambisius pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 perlu didukung oleh perangkat perlindungan sosial yang tanggap terhadap risiko perubahan iklim dan bencana alam.

Perlindungan Sosial Adaptif (ASP) merupakan strategi pengentasan kemiskinan yang menekankan langkah proaktif dan preventif dalam menghadapi berbagai bentuk shock, termasuk bencana alam, di mana cakupan jaring perlindungan sosial diperluas untuk masyarakat yang terindikasi rentan masuk ke dalam zona kemiskinan. Percepatan implementasi konsep ini dapat mendukung target penurunan tingkat kemiskinan yang dicanangkan pemerintah dan juga menjadi instrumen untuk memperkuat posisi kelas menengah yang rentan.

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan anggota dapat berpartisipasi dalam mendorong implementasi ASP di Indonesia melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam jangka pendek (kurang dari 2 tahun), menengah (2-5 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun).

Sebagai upaya awal, PFI perlu i) membangun fondasi pelaksanaan program ASP melalui forum inisiasi yang melibatkan pemangku kepentingan dari anggota PFI yang aktif dalam pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana, lembaga pemerintah, NGO, akademisi, dan sektor swasta; ii) mengukuhkan peran filantropi dalam ekosistem ASP melalui penguatan regulasi penopang implementasi ASP; dan iii) mengembangkan pilot project implementasi ASP yang akan dijalankan dalam jangka menengah.

Memasuki jangka menengah, PFI perlu i) mengkonsolidasi data yang dimiliki oleh filantropi dengan database Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki oleh pemerintah; ii) mengeksplorasi peluang kerja sama pembagian data dengan BNPB dan BPD LH; dan iii) memperluas kemitraan dengan pemerintah, pemangku kepentingan lokal, dan donor internasional. Sebagai agenda berkelanjutan jangka panjang, PFI dapat berkontribusi dalam mendorong i) institusionalisasi, replikasi, dan multiplikasi pilot projects yang telah teruji keberhasilannya; dan ii) pembangunan sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) terpadu untuk memantau efektivitas, efisiensi, dan dampak program.





Pendahuluan dan Konteks Permasalahan

Komitmen Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan nasional. Strategi pengurangan kemiskinan pemerintah Indonesia berupaya untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 1 yang menargetkan pengentasan kemiskinan dalam segala dimensinya. Data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa Indeks Kemiskinan (PO) di Indonesia secara bertahap telah menurun dari 9,78% pada tahun 2020 menjadi 9,03% pada tahun 2024. Pemerintah mencanangkan target yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu menurunkan kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Selain menangani kemiskinan ekstrem, ada kebutuhan yang meningkat untuk memperhatikan rakyat yang berada di atas garis kemiskinan, yakni kelas menengah rentan, yang menghadapi risiko jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan (*shock*) ekonomi, seperti dampak perubahan iklim. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa

kekurangan pendapatan dan ketidaksetaraan yang signifikan masih ada, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,46% dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,35% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak yang telah bangkit dari kemiskinan ekstrem, mereka tetap berisiko untuk kembali terpuruk ke dalam kondisi tersebut, utamanya karena peristiwa terkait iklim yang semakin berdampak pada stabilitas ekonomi dan mata pencaharian.

Konteks ini menegaskan kebutuhan akan Perlindungan Sosial Adaptif (ASP) sebagai bagian penting dari strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Asta Cita ke-6 yakni “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”, target pertama adalah terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk. Tidak seperti perlindungan sosial konvensional yang secara utama menargetkan kelompok ekonomi lemah, ASP memperluas fokusnya untuk mencakup mereka yang rentan terhadap kemiskinan akibat risiko yang diinduksi oleh iklim. Dengan mengintegrasikan



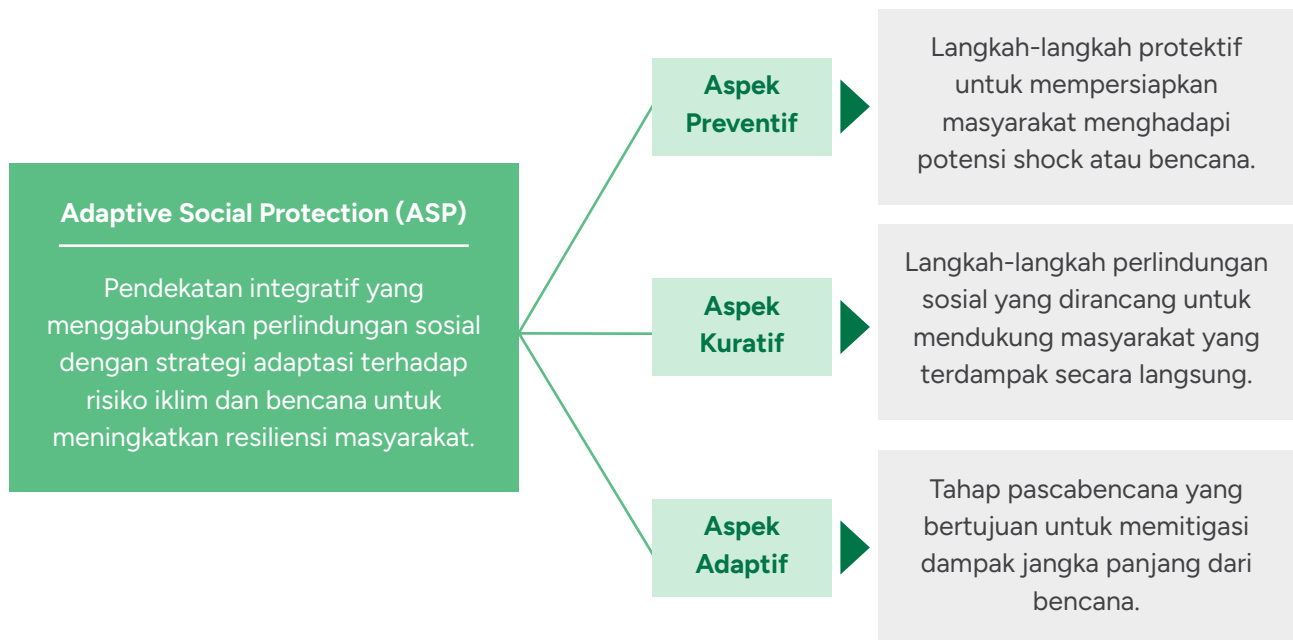
adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam program perlindungan sosial, ASP menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi ke depan yang merespons tantangan ekonomi dan lingkungan (Weldegebriel & Prowse, 2013). Bagi Indonesia, yang notabene bencana alam sering terjadi dan risiko iklim meningkat setiap tahun, ASP menyediakan kerangka kerja yang sangat dibutuhkan untuk melindungi komunitas rentan. Program seperti proyek infrastruktur tahan iklim, bantuan sosial responsif bencana, dan skema asuransi yang ditargetkan adalah contoh bagaimana ASP dapat secara langsung menangani risiko kemiskinan yang disebabkan oleh iklim (Frimpong et al., 2015).

Lembaga filantropi memainkan peran yang makin penting dalam memajukan ASP di Indonesia. Banyak organisasi filantropi memiliki sumber daya, jaringan, dan fleksibilitas yang memungkinkan mereka mendukung inisiatif ASP dengan cara yang melengkapi upaya pemerintah. Kolaborasi terbaru antara Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), yang merupakan wadah para pegiat filantropi di Indonesia, dan badan pemerintah telah menunjukkan potensi

filantropi untuk menjembatani kesenjangan dalam program pengentasan kemiskinan yang dipimpin pemerintah melalui mobilisasi sumber daya dan memperkuat ketahanan komunitas. Namun, terdapat kesenjangan operasional yang perlu diatasi oleh entitas filantropi, seperti peningkatan manajemen bencana dan pengembangan sistem berbagi data yang lebih baik. Hasil FGD menekankan bahwa meskipun banyak organisasi aktif selama krisis, masih ada kebutuhan akan strategi jangka panjang yang berkelanjutan yang melampaui pemulihan hingga mencakup pembangunan ketahanan dan kesadaran iklim.

Tujuan pembangunan manusia Indonesia, khususnya Asta Cita dan Indonesia Emas 2045, bercita-cita untuk mengangkat bangsa ke tingkat sosial-ekonomi yang lebih tinggi. Ambisi ini tidak akan tercapai tanpa terlebih dahulu mengatasi meningkatnya risiko iklim yang mengancam kelompok rentan. Oleh karena itu, ASP menghadirkan peluang strategis bagi filantropi untuk berkontribusi lebih kuat terhadap pengentasan kemiskinan, yang secara langsung selaras dengan komitmen SDG Indonesia dan aspirasinya untuk pertumbuhan berkelanjutan.

ASP sebagai Strategi Prioritas untuk Pengentasan Kemiskinan



Gambar 1. Konsep dan Aspek dari Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection)
Sumber: Olahan LPEM FEB UI (2025)

Meningkatnya ketidakpastian global dan frekuensi guncangan, terutama akibat perubahan iklim dan bencana, membuat kesejahteraan masyarakat semakin rentan (Béné et.al., 2014; Costella et.al., 2023). Untuk mencegah kelompok rentan jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan saat krisis, diperlukan penguatan resiliensi individu dan ketahanan keluarga. Dalam konteks ini, ASP muncul sebagai pendekatan integratif yang menggabungkan perlindungan sosial dengan strategi adaptasi terhadap risiko iklim dan bencana (Bowen et.al., 2020). ASP tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga memperkuat jaring pengaman sosial yang responsif terhadap krisis, melindungi mata pencaharian secara berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat dalam mitigasi dampak bencana (Kuriakose et.al., 2013; Nelson et.al., 2016). Dengan memberikan perlindungan yang lebih adaptif, ASP diyakini mampu meningkatkan ketahanan sosial terhadap dinamika risiko global, termasuk perubahan iklim dan bencana yang memperburuk kondisi kemiskinan (Kuriakose et.al., 2013).

ASP mencakup tiga aspek utama dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap guncangan (Bowen et.al., 2020).





Aspek preventif

Tujuan utamanya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyesuaikan diri ketika menghadapi krisis. Upaya mitigasi diwujudkan melalui pemberian informasi mengenai risiko dan solusi praktis yang dapat diambil. Langkah ini diharapkan membangun pengetahuan dan kesiapsiagaan, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi dan mengurangi dampak negatif dari shock. Filantropi berperan dalam mitigasi dengan memberikan edukasi dan pembekalan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang rentan bencana¹. Contohnya dengan memetakan kapasitas masyarakat agar dapat memetakan langkah strategis yang bisa dilakukan dalam skala komunitas agar dapat mengedukasi terkait kesiapan masyarakat ketika terjadi bencana dan pasca bencana.



Aspek kuratif

Diterapkan saat terjadi *shock* atau bencana. Masyarakat yang telah menerapkan strategi preventif biasanya memiliki cadangan aset atau bantuan yang dapat dimobilisasi secara cepat, sehingga memungkinkan mereka bertahan selama periode krisis tanpa mengalami penurunan kesejahteraan yang signifikan. Di tahap ini, lembaga filantropi biasanya memberikan bantuan sosial secara langsung ke lokasi bencana dan penyintas yang terdampak. Akan tetapi, efektivitas dapat ditingkatkan dengan melakukan kolaborasi yang lebih masif dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta². Sinergi ini memastikan bantuan terkoordinasi dengan baik dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dengan cepat dan tepat.

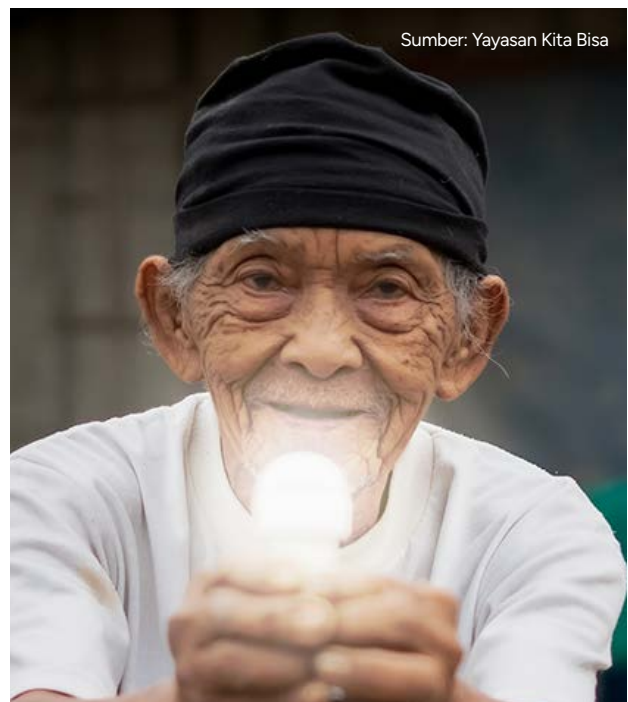


Aspek adaptif

Mencakup upaya pemulihan dan pembangunan kembali, yang disertai dengan peningkatan ketahanan masyarakat agar lebih siap menghadapi krisis serupa di masa depan. Intervensi ini dapat berupa rekonstruksi infrastruktur, pemulihan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kapasitas adaptif mereka di masa

mendatang. Setelah bencana, filantropi berperan dalam pemberdayaan masyarakat yang terdampak. Pada fase pemulihan, masyarakat yang miskin sering kali terpaksa membuat keputusan sulit antara memenuhi kebutuhan pokok dan melakukan perbaikan ekonomi. Hal ini berpotensi mempengaruhi biaya kesehatan dan pendidikan jangka panjang bagi mereka. Kesadaran terkait pemulihan jangka panjang ini telah banyak disadari. Akan tetapi, masih muncul kendala sulitnya akses terkait kebutuhan data pasca bencana dan distribusi yang relatif kurang akurat menjadi evaluasi yang perlu menjadi catatan agar alokasi bantuan bisa lebih efisien³.

Kontribusi yang lebih luas sangat memungkinkan untuk dicapai, terutama melalui peran aktif PFI dan para anggotanya dalam mendukung berbagai aspek pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan sejumlah poin pada Agenda Pembangunan Nasional yang dipetakan pada Tabel 1, di mana filantropi dapat berperan sebagai katalis dalam mempercepat pencapaian target pembangunan, khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tabel 1 juga memetakan pemangku kepentingan utama yang menjadi pemangku kebijakan dan bertanggung jawab terhadap capaian di dalam tiap target pembangunan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini, bersama dengan anggota PFI tentunya akan mendukung efektivitas pencapaian agenda pembangunan Indonesia.



¹ Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan lima anggota FI bersama LPEM FEB UI secara daring pada tanggal 24 Oktober 2024.

² Idem

³ Idem

Tabel 1. Pemetaan Arah Tujuan Pembangunan Nasional

RPJMN 2025-2029	Arah Tujuan Pembangunan RPJPN 2025-2045	Pemangku Kepentingan
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	• Stabilitas Ekonomi Makro • Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan • Lingkungan Hidup Berkualitas • Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan • Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Kehutanan • Badan Pangan Nasional • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Kementerian Kesehatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pertanian • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Transmigrasi • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) • Pemerintah Daerah • Badan Usaha
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	• Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi • Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Perlindungan Sosial yang Adaptif • Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	

Sumber: Rangkuman Penulis (dokumen RPJMN 2025-2029)



Peran Lembaga Filantropi dalam Mendukung ASP di Indonesia⁴

Kemajuan yang Telah Dicapai oleh Filantropi di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi filantropi Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam ASP dengan tujuan guna mengurangi dampak perubahan iklim dan guncangan ekonomi. Berdasarkan Indonesia Philanthropy Outlook 2024 yang dirilis PFI, 89% program filantropi telah menargetkan tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan aksi iklim (SDG 13). Sekitar 69% dari program-program ini juga mengintegrasikan adaptasi iklim ke dalam agenda mereka. Pendekatan mereka bersifat multifaset: respons bencana, pemberdayaan masyarakat, dan inisiatif ketahanan mata pencaharian yang melengkapi program perlindungan sosial pemerintah yang sudah ada.

Untuk menggali lebih dalam mengenai peran filantropi di dalam upaya tercapainya sistem perlindungan sosial yang adaptif, PFI dan LPEM FEB UI mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama beberapa anggota PFI di bulan Oktober 2024. Hasil dari diskusi ini memberikan beberapa

wawasan langsung dari lapangan (*field insights*) di dalam pelaksanaan program filantropi dan bagaimana program-program ini dapat bersinergi dengan upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Bagian ini merangkum poin-poin utama dari hasil diskusi ini.

Salah satu area di mana lembaga-lembaga filantropi ini unggul adalah dalam upaya meningkatkan ketahanan lokal melalui program-program yang disesuaikan untuk menangani kerentanan spesifik masyarakat. Sebagai contoh, lembaga-lembaga filantropi ini melakukan pemetaan sosial untuk mengidentifikasi risiko yang unik bagi setiap wilayah, membantu masyarakat mempersiapkan diri menghadapi kejadian seperti kekeringan dan banjir. Pendekatan kesadaran risiko ini sangat penting bagi wilayah-wilayah dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah.

Selain itu, filantropi berperan penting dalam menggerakkan sumber daya untuk bantuan bencana secara cepat. Lembaga filantropi bekerja sama dengan entitas pemerintah dan pemimpin lokal untuk memperlancar distribusi bantuan, terutama

⁴ HPFI dan LPEM FEB UI mengadakan diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan beberapa anggota PFI pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk menggali insight dari organisasi filantropi mengenai lanskap filantropi di Indonesia, peluang, dan juga tantangan di dalam implementasi lapangan. FGD dilaksanakan dengan beberapa perwakilan dan anggota PFI. Walaupun hasil dari FGD ini tidak dapat digeneralisir, masukan dari para anggota yang hadir memberikan gambaran mengenai bagaimana peran filantropi di lapangan, terutama saat terjadi shock di dalam (baik berupa bencana maupun gejolak dinamika perekonomian).

di wilayah yang terdampak bencana alam. Dengan memanfaatkan pendanaan fleksibel dan kemitraan lokal mereka, mereka dapat merespons dengan cepat dan menyediakan sumber daya penting, sering kali mengisi kesenjangan kritis dalam bantuan pemerintah.

Upaya tersebut tidak hanya berupa bantuan langsung, tetapi juga menuju pembangunan ketahanan jangka panjang. Beberapa inisiatif mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan, seperti rumah tahan banjir, dan mempromosikan usaha mikro berbasis komunitas, memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan sumber pendapatan yang mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan eksternal. Pendekatan yang proaktif dan berfokus pada ketahanan ini semakin mendapat perhatian sehingga memposisikan filantropi sebagai pemain utama dalam memperkuat kerangka perlindungan sosial adaptif di Indonesia. Upaya-upaya ini juga berdampak karena integrasi pendekatan berbasis komunitas. “*Champions*” lokal diidentifikasi dan diberdayakan untuk memimpin inisiatif, menumbuhkan budaya kemandirian di dalam masyarakat.

Tantangan penerapan ASP di Indonesia

1. Belum optimalnya sistem perlindungan sosial dalam menghadapi risiko dan shock

Sistem perlindungan sosial di Indonesia masih belum mengantisipasi faktor-faktor yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ali dan Setiawan (2022), sekitar 12,6 persen rumah tangga pedesaan dan 4,26 persen rumah tangga perkotaan memerlukan bantuan sosial ketika diterpa *covariate shock* atau krisis. Sistem perlindungan sosial yang ada belum mempertimbangkan hal ini sehingga sebagian kelas menengah akan masuk ke dalam zona kemiskinan ketika menghadapi *shock*. Bantuan yang diberikan juga belum mencukupi untuk menutupi penurunan konsumsi yang disebabkan oleh kondisi tersebut.

2. Terbatasnya sistem data dan informasi serta integrasi dengan sistem peringatan dini

Sistem data dan informasi di Indonesia belum diperbarui dengan frekuensi yang memadai untuk penerapan ASP dan juga belum terintegrasi dengan sistem peringatan dini. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi kelompok rentan secara *real-time* dan menyalurkan bantuan dengan cepat saat bencana terjadi.

Di sisi lain, lembaga filantropi juga menghadapi tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan data yang akurat. Tanpa *social mapping* yang baik, kebutuhan masyarakat dapat terlewat sehingga efektivitas program ASP menjadi terbatas. Sebagai contoh, lembaga filantropi seringkali berhadapan dengan tantangan berupa akurasi dan tingkat kebaruan data dari pemerintah yang memiliki *inclusion* atau *exclusion error*⁵. Selain itu, memverifikasi data penerima bantuan juga membutuhkan sumber daya manusia dan waktu sehingga dapat mengulur pendistribusian bantuan. Oleh karena itu, integrasi data antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga filantropi, dapat didorong untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

3. Pendanaan yang belum berkelanjutan dan masih bersifat reaksioner

Pendanaan ASP di Indonesia secara umum masih bersifat reaksioner, di mana sistem pendanaan untuk kebutuhan pra-bencana masih belum matang. Kendati pemerintah Indonesia telah mendirikan *pooling fund* bencana melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021, hingga saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur operasionalisasi penyaluran dana yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) tersebut (UNICEF & MOF, 2024). Padahal, lembaga filantropi memiliki potensi untuk berkontribusi dalam dana tersebut di mana dana bersama penanggulangan bersama disebutkan dapat bersumber dari hibah.

⁵ Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa anggota PFI bersama LPEM FEB UI secara daring pada tanggal 24 Oktober 2024.

Sementara itu, dana filantropi sendiri juga tidak selalu stabil dan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan Indonesia Philanthropy Outlook 2024, terdapat tren pengumpulan dana yang cukup fluktuatif antara tahun 2021-2023. Dana yang terkumpul pada tahun 2023 sebesar Rp 2.824 triliun, lebih rendah dari dua tahun sebelumnya (Rp 3.048 triliun pada 2021 dan Rp 3.435 triliun pada 2022). Meskipun Indonesia memiliki tradisi filantropi yang kuat, donasi yang tidak stabil dapat menyebabkan keberlangsungan program ASP yang semata-mata didukung oleh program filantropi menjadi tidak berkelanjutan. Persaingan dengan kebutuhan filantropis lainnya, seperti kebutuhan pendidikan dan kesehatan, juga akan mempengaruhi alokasi dana untuk ASP.

4. Belum efisiennya koordinasi kelembagaan

Koordinasi antar lembaga dengan motif humaniter yang sama untuk menyelenggarakan ASP masih belum optimal. Secara teknis, koordinasi antara pemerintah dan berbagai pihak seperti *non-governmental organization* (NGO) dan lembaga filantropi memang mengalami kemajuan dengan adanya rapat koordinasi klaster dalam berbagai kejadian bencana. Akan tetapi, masih terdapat celah untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah terpencil, masih terbatas dalam mengintegrasikan praktik ASP dari mitigasi hingga pemberian bantuan sosial.

Lembaga filantropi juga menghadapi tantangan dalam berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi yang kuat diperlukan untuk memastikan legalitas, legitimasi, dan dampak dari program ASP yang dijalankan. Akan tetapi, sinergi ini masih terhambat oleh ketidakselarasan yang umum terjadi antara tujuan dan prioritas pemerintah dengan tujuan lembaga filantropi⁶. Selain itu, pemerintah daerah belum tentu memiliki pemahaman yang memadai mengenai ASP sehingga keterbukaan untuk bekerja sama masih menjadi kendala. Faktor pendukung utama bagi peran filantropi ini adalah

kualitas sumber daya manusia di masyarakat dan adanya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah setempat. Pemerintah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perlindungan sosial adaptif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lembaga filantropi untuk berkontribusi maksimal dalam mengurangi dampak bencana dan meningkatkan ketahanan sosial.

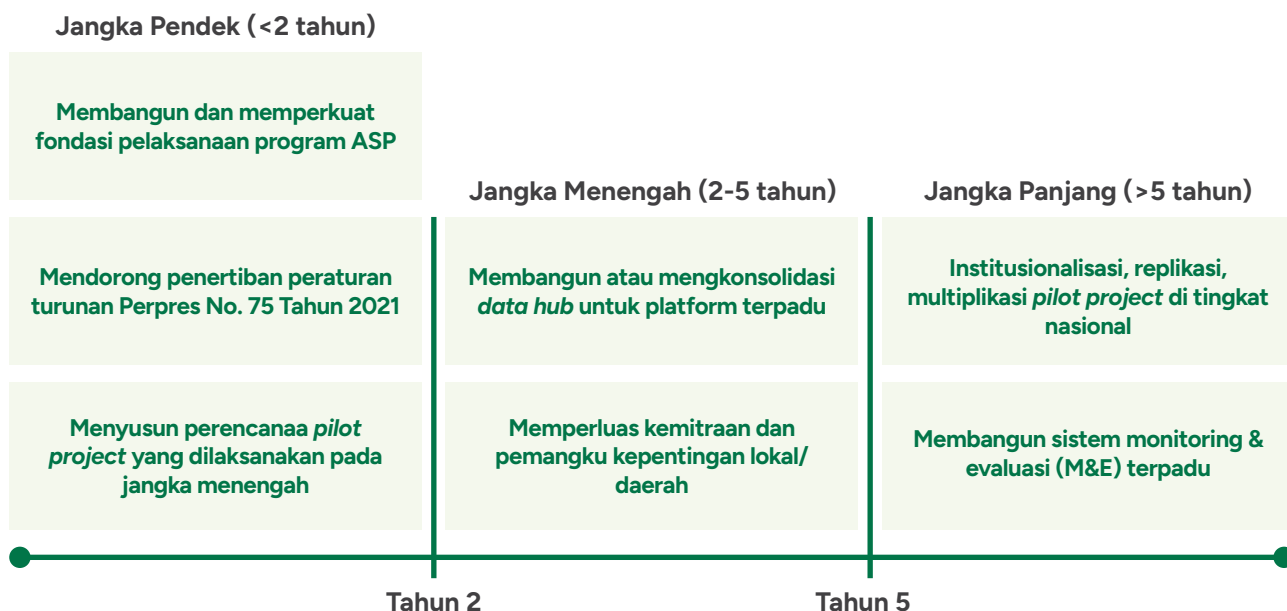
5. Regulasi dan kelembagaan yang masih belum kondusif

Regulasi yang mengatur operasi lembaga filantropi di Indonesia belum sepenuhnya mendukung implementasi ASP secara optimal. Peraturan terkait donasi dan insentif pajak yang ada masih sangat terbatas dan dapat mengurangi kesediaan lembaga filantropi untuk berpartisipasi secara ekstensi dalam implementasi ASP.



⁶ Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa anggota PFI bersama LPEM FEB UI secara daring pada tanggal 24 Oktober 2024.

Rekomendasi Kebijakan dan Implikasi



Gambar 2. Peta Rekomendasi Kebijakan
Sumber: LPEM FEB UI (2025)

Jangka Pendek (kurang dari 2 tahun)

PFI dapat membangun fondasi pelaksanaan program ASP, bersama pemangku kepentingan lainnya yang bersifat kolaboratif dengan membentuk forum inisiasi sebagai wadah koordinasi yang konkret, mengikat, namun terbuka bagi semua pemangku kepentingan. forum tersebut akan menghimpun aktor-aktor relevan, termasuk anggota PFI yang aktif dalam pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana, lembaga pemerintah, NGO, akademisi, dan sektor swasta. Forum tersebut bertanggung jawab dalam menetapkan arahan inisiatif, menyusun teori perubahan (*theory of change*), serta merancang tata kelola forum yang menitikberatkan transparansi dan akuntabilitas. PFI dapat memberikan kontribusi dalam forum SDGs Collaboration Center dengan menunjuk klaster-klaster filantropi yang relevan, seperti Klaster Ketahanan Pangan dan Gizi serta Klaster Permukiman dan Perkotaan, sebagai satuan tugas yang berperan sebagai *focal point*.

Dukungan dan keterlibatan pemerintah juga menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan inisiatif ASP. Untuk mendorong dukungan dari pemerintah, PFI perlu memanfaatkan kemitraan yang telah berlangsung dengan Bappenas, khususnya Sekretariat Nasional SDGs, maupun Kementerian Koordinator terkait untuk mempromosikan inisiasi ini. Bappenas diharapkan dapat berperan sebagai pusat koordinasi dan membantu menggaet dukungan serta partisipasi aktif dari kementerian dan lembaga lain yang berperan krusial dalam implementasi program ASP seperti BNPB, Kemensos, dan BPD LH. Dalam hal ini pula, PFI dapat mengeksplorasi potensi BP Taskin sebagai unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki untuk menjadi badan koordinasi terkait sistem perlindungan sosial adaptif di Indonesia.

Berbeda dengan sebagian besar negara berkembang di kawasan ASEAN yang umumnya belum memiliki lembaga khusus dengan fungsi

koordinasi dan pemantauan terhadap implementasi sistem perlindungan sosial adaptif, fungsi tersebut biasanya dijalankan oleh Kementerian Sosial dan didukung oleh lembaga penanggulangan bencana, Indonesia memiliki peluang strategis melalui keberadaan BP Taskin. Lembaga ini berpotensi untuk menjadi institusi khusus yang mendorong koordinasi lintas kementerian dan lintas sektor dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan sosial yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi, tantangan perubahan iklim, serta krisis lingkungan.

Dengan terbentuknya forum inisiatif implementasi ASP, terdapat dua aspek yang perlu diutamakan oleh PFI dan para anggotanya:

1. PFI, bersama pemangku kepentingan lainnya, perlu melakukan inventarisasi atau pemetaan terhadap program dan sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang tergabung dalam forum tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih tanggung jawab antara lembaga yang terlibat. Selain itu, dengan adanya inventarisasi, forum dapat menetapkan target yang realistis untuk dicapai dengan sumber daya yang ada.
2. PFI juga perlu mendorong masing-masing anggota untuk membangun gugus tugas internal kolaborasi implementasi ASP. Setiap lembaga filantropi diharapkan dapat mengerahkan personel yang didedikasikan sebagai kelompok kerja internal aktif berkontribusi dalam forum ini. Gugus internal ini adalah pihak dari masing-masing organisasi yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan PFI dan pemangku kepentingan lainnya, seperti melakukan mekanisme berbagi data dan pertemuan rutin minimal setiap kuartal. Koordinasi dari gugus internal ini juga perlu menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ASP yang terintegrasi yang mencakup prosedur tanggap bencana, bagan alur komunikasi lintas-lembaga, pelaporan keuangan, dan protokol pengawasan.

Fokus berikutnya dalam jangka pendek adalah mendorong penguatan regulasi melalui advokasi yang mendukung kondusivitas lembaga filantropi agar dapat mengukuhkan ekosistem ASP di Indonesia. Salah satu advokasi yang dapat dilakukan

adalah mendorong Kementerian Keuangan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur penyaluran dari dana yang dikelola oleh pooling fund bencana. Hingga saat ini, Perpres No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana baru menetapkan sumber-sumber dana dan peruntukan umum dari *pooling fund*. Sementara itu, belum ada peraturan turunan yang menjelaskan mekanisme dan skema dari penggunaan dana ini secara detail. Oleh karena itu, peraturan turunan yang memberikan ketentuan spesifik mengenai *pooling fund* bencana sangat dibutuhkan dalam menentukan kepastian ketersediaan dana untuk ASP.

Fokus terakhir yang perlu dilakukan dalam jangka pendek adalah menyusun rencana *pilot project* implementasi ASP yang akan dijalankan dalam jangka menengah. *Pilot project* ini dilakukan di salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi dari bencana untuk menguji implementasi dari SOP yang telah disusun.

Jangka Menengah (2-5 tahun)

PFI perlu membangun atau mengkonsolidasi *data hub* yang sudah ada sebagai platform terpadu berbasis web dan aplikasi yang menampilkan distribusi bantuan, kapasitas filantropi, serta data kebutuhan masyarakat terdampak. Di saat yang bersamaan, PFI dan lembaga-lembaga filantropi yang berfokus dalam pengentasan kemiskinan juga perlu mengeksplorasi peluang-peluang kerjasama berbagi data dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru diluncurkan oleh pemerintah. Keberhasilan dari kolaborasi antara *data hub* yang dimiliki oleh PFI dengan *database* milik pemerintah akan mempermudah sinkronisasi informasi, dan lebih lanjut meningkatkan akurasi, efektivitas, dan efisiensi pemberian bantuan kepada penerima.

PFI juga perlu mengeksplorasi peluang kerjasama berbagi dengan BNPB dan BPDH yang, berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2025, belum diberikan hak dan tanggung jawab dalam DTSEN. BNPB memiliki data relevan terkait dengan kerawanan dan risiko bencana, sementara BPDH bertanggung jawab atas pengelolaan *pooling fund* bencana. Harmonisasi data dengan kedua informasi ini akan mempermudah

identifikasi penerima bantuan sosial adaptif dan koordinasi alokasi dana.

PFI juga harus memperluas kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lokal melalui forum *multi-stakeholder*, melibatkan BPBD, dinas sosial, donor internasional, dan komunitas lokal untuk memastikan efektivitas program. Partisipasi masyarakat dalam pemetaan risiko dan infrastruktur tangguh menjadi kunci keberlanjutan. Selain itu, regenerasi komunitas dan kemandirian lokal perlu didorong melalui program pemberdayaan seperti pelatihan vokasi, dukungan usaha mikro, dan pembangunan infrastruktur sosial agar pemulihan pasca bencana lebih berkelanjutan dan sesuai kebutuhan lokal.

Jangka Panjang (lebih dari 5 tahun)

Fase jangka panjang difokuskan pada proses institusionalisasi, replikasi, dan multiplikasi *pilot projects* yang telah teruji keberhasilannya. Tujuan utama pada fase ini adalah melakukan pelembagaan mekanisme ASP secara luas sehingga tercakup dalam kerangka regulasi nasional serta cetak biru pembangunan nasional. Kodifikasi ini memastikan

bahwa inisiasi ini menjadi strategi pembangunan yang terstruktur dan dapat di replikasi dan multiplikasi secara nasional. Selain itu, mekanisme ASP yang terkodifikasi dalam kebijakan pemerintah dan menjadi panduan bagi lembaga filantropi dalam merencanakan intervensi jangka panjang. Dengan demikian, kolaborasi filantropi-pemerintah tidak lagi bersifat ad-hoc, melainkan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana serta guncangan ekonomi.

Sistem Monitoring & Evaluasi (M&E) terpadu juga perlu dibangun agar para pemangku kepentingan dapat memantau efektivitas, efisiensi, dan dampak program ASP secara berkelanjutan. Melalui mekanisme M&E yang terstandarisasi, semua pihak, pemerintah, filantropi, donor, dan masyarakat, mampu menilai sejauh mana kolaborasi telah berkontribusi pada pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif, serta pengurangan kemiskinan. Selain itu, hasil evaluasi berkala dapat digunakan untuk memperbaiki pendekatan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).



Apresiasi & Penghargaan

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota atas kontribusinya dalam penyusunan publikasi ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi khusus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan *Strategic Paper: Menjembatani Kesenjangan: Mengoptimalkan Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan dan Inklusi Ekonomi*



Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah NGO milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.



Yayasan Kita Bisa

Kitabisa.org adalah platform donasi digital terbesar di Indonesia yang kini berkembang menjadi solusi menyeluruh untuk pengelolaan dana filantropi. Sejak berdiri pada tahun 2013, Kitabisa telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun, melibatkan 8+ juta donatur, dan bermitra dengan 500+ perusahaan untuk melaksanakan lebih dari 479.000 kampanye sosial di seluruh Indonesia. Inovasi utama kami adalah skema blended financing—yakni penggabungan berbagai sumber dana seperti donasi publik, dana CSR, hibah, anggaran pemerintah, dan dana berbasis keagamaan untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan.

Referensi

- Ali, R., and I. Setiawan. (2022). Looking Beyond Aggregate Poverty and Vulnerability Rates in Indonesia: Aligning Social Protection with Sources of Vulnerability to Poverty. The World Bank.
- Béné, C., Newsham, A., Davies, M., Ulrichs, M., & Godfrey-Wood, R. (2014). Resilience, poverty and development. *Journal of international development*, 26(5), 598-623.
- Bowen, T., Del Ninno, C., Andrews, C., Coll-Black, S., Johnson, K., Kawasoe, Y. & Williams, A. (2020). Adaptive social protection: building resilience to shocks. World Bank Publications.
- Costella, C., van Aalst, M., Georgiadou, Y., Slater, R., Reilly, R., McCord, A., & Barca, V. (2023). Can social protection tackle emerging risks from climate change, and how? A framework and a critical review. *Climate Risk Management*, 40, 100501.
- Frimpong, K., Van Etten, E., Oosthuizen, J., & Fannam, V. N. (2015). Review of Climate Change Adaptation and Social Protection Policies of Ghana. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 6(4), 1–14. <https://doi.org/10.4018/ijsesd.2015100101>
- IPSOS Indonesia. (2024). Indonesia Philanthropy Outlook 2024: Progress, Tren, dan Agenda Prioritas untuk Pencapaian SDGs. Perhimpunan Filantropi Indonesia.
- Kuriakose, A. T., Heltberg, R., Wiseman, W., Costella, C., Cipryk, R., & Cornelius, S. (2013). Climate-responsive social protection. *Development Policy Review*, 31, o19–o34.
- Nelson, D. R., Lemos, M. C., Eakin, H., & Lo, Y. J. (2016). The limits of poverty reduction in support of climate change adaptation. *Environmental Research Letters*, 11(9), 094011.
- Rassanjani, S. (2018). Ending Poverty: Factors That Might Influence the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3), 114. <https://doi.org/10.5296/jpag.v8i3.13504>
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.793>
- Tisei, F., & Ed, M. (2024). Unleashing Adaptive Potential for Social Protection – Good Adaptive Social Protection Practices in The Latin America And Caribbean Region. The World Bank.
- UNICEF & MOF (2024). “Integrating Adaptive Social Protection Financing into Disaster Risk Financing Strategy: The Scope of the Disaster Pooling Fund in Financing Emergency Social Protection and Considerations for the Fund’s Regulation.”
- Weldegebriel, Z. B., & Prowse, M. (2013). Climate-Change Adaptation in Ethiopia: To What Extent Does Social Protection Influence Livelihood Diversification? *Development Policy Review*, 31, o35–o56. <https://doi.org/10.1111/dpr.12038>
- Williams, A., Hadiwidjaja, G., Ali, R., and Setiawan, I. (2023). Adaptive Social Protection, Human Capital, and Climate Change: Identifying policy priorities for Indonesia. The World Bank.

Lampiran

Pembelajaran dari Praktik Internasional (Best Practices)

ASP merupakan kerangka yang baru dalam ranah perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, bahkan pada tataran global. Kendati demikian, infrastruktur dan institusi yang sudah dikembangkan sebelumnya untuk kebutuhan perlindungan sosial dan manajemen risiko bencana dapat menjadi modal penerapan ASP.

Argentina

Beberapa krisis ekonomi yang menerpa Argentina dalam beberapa dekade terakhir memaksa pemerintahnya untuk mengembangkan program perlindungan sosial yang berorientasi pada mempersiapkan kelompok rentan dalam menghadapi *shock*. Salah satu program utama yang dimiliki pemerintah Argentina adalah *Asignacion Universal por Hijo* (AUH). Program AUH memberikan bantuan terhadap 4,4 juta keluarga rentan dengan anak-anak, di mana besaran manfaat bersifat proporsional terhadap tingkat kerentanan.

Program ini berkontribusi menurunkan kemiskinan di antara penerima manfaat sebesar 16 persen. Selain itu, setelah pandemi Covid-19, Argentina juga memperbesar cakupan AUH dengan juga memberikan bantuan kepada keluarga rentan dengan pengangguran atau asisten rumah tangga.

Brazil

Sebelum tahun 2019, diestimasikan bahwa sekitar 90 persen rumah tangga di Brazil setidaknya memiliki satu anggota yang menerima bantuan “perlindungan pendapatan”, baik karena status formalitas pekerjaan, usia tua, atau tingkat pendapatan rumah tangga. Sebagian besar penduduk Brazil dilindungi oleh program *Bolsa Familia* (BF) yang merupakan program *conditional cash transfer* terbesar di dunia. Program ini juga dinilai fleksibel dalam menanggapi dampak bencana alam. Sebagai contoh, ketika bencana Bendungan Brumadinho terjadi pada tahun 2019, penerima manfaat di wilayah terdampak dapat langsung menerima manfaat dari program tersebut dan diberikan tanpa syarat.



STRATEGIC PAPER

Menjembatani Kesenjangan: Mengoptimalkan Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan dan Inklusi Ekonomi



Jl. Angkasa No.55, RT.7/RW.5,

Jakarta Pusat, 10720

Telepon: (021) 6287234

E-mail: info@filantropi.or.id